

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala)

Moh. Mahmud

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Email : mahmudlabuan77@gmail.com*

Kata Kunci

1. Implementasi Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Standar dan sasaran kebijakan
6. Komunikasi antara organisasi
7. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Abstrak : Berdasarkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Pemerintah Kab. Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan di Kabupaten Donggala. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Metode: Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa informan kunci yang mampu menjawab beberapa pertanyaan. **Hasil/Temuan:** Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal. Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik. Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberiakn oleh pemerintah. **Kesimpulan:** Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.

Keyword

1. Policy Implementation
2. Resources
3. Characteristics of implementing agents
4. The attitude of the implementers
5. Policy standards and targets
6. Communication between organizations
7. Social, economic and political environment.

Abstract : Based on Presidential Instruction No.10 of 2018 concerning the acceleration of rehabilitation and reconstruction after the earthquake disaster. District Government Donggala has a target for completing the implementation, namely that the community housing buildings will be completed in December 2019, however, as of 2021, the rehabilitation and reconstruction program has still not been completed in Donggala Regency. Objective: This research aims to find out how the implementation of Disaster Management policies through the Post-Earthquake Disaster Rehabilitation and Reconstruction Program in Labuan sub-district, Donggala Regency. Method: Research conducted using descriptive qualitative methods. Data collection was carried out through direct observation at the research location, interviews with several key informants who were able to answer several questions. **Results/Findings:** That, the implementation of Disaster Management Policies through the Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Program in Labuan District, Donggala Regency, Sulawesi Province has not been optimal. Measured from the dimensions of Van Meter and Van Horn's theory, there are dimensions of standards and targets that have not been implemented well. For example, in carrying out post-disaster rehabilitation and reconstruction programs, the district government, through sub-district assistants appointed to carry out data collection on heavily and lightly damaged houses, is not on target, these assistants prioritize the interests of families and groups, so that some people complain about the policies implemented by the government. **Conclusion:** Implementation of Disaster Management Policies through the Rehabilitation and Reconstruction Program after the earthquake disaster in Labuan District, Donggala Regency, there are still obstacles that hinder the completion of program implementation, so that the program is not running well and there are still many problems in the field. As is the case with data collection that was not on target, resulting in several re-collections of data from the Government to the community, and there are still many shortcomings that need to be addressed and corrected.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menjadi sebuah perlindungan itu sendiri untuk melindungi masyarakat yang notabene adlah warga nnegara dan berkebangsaan Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang memiliki hak dan wewenang serta kemampuan dalam upaya perlindungan hidup dan penghidupannya yang dimana seperti kecelakaan, bencana yang berpotensi terjadi maupun yang sudah terjadi, dan kondisi lainnya yang kiranya dapat memberi bahaya pada orang-orang hingga sampai pada Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk tanggung jawab dari negara adalah

untuk dapat melindungi warga negara yang berbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala sesuatu yang berbentuk kecelakaan, bencana, dan kondisi gawat darurat pada manusia, dan bentuk perlindungan yang dilakukan melalui pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa.

Berdasarkan UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Maka pemerintah mempunyai tanggung jawab berupa cepat tangggap dalam merespon setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak. Seperti bencana gempa bumi yang melanda Kota Palu, Sigi dan kabupaten Donggala tahun 2018. Untuk Kabupaten Donggala sendiri hampir seluruh Kecamatan terkena dampak dari bencana gempa bumi di antaranya 12 Kecamatan yang terkena dampak dan 1 Kecamatan yang bersih dari kerusakan akibat bencana gempa. Seperti Kecamatan Rio Pakava ada 47 rumah rusak berat, 44 rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Sementara itu di Desa Banawa Selatan 672 rumah rusak berat, 458 rusak sedang dan 1,408 rusak ringan. Kecamatan Banawa Tengah 770 rumah rusak berat, 500 rusak sedang dan 770 rusak ringan. Kecamatan Banawa 915 rumah rusak berat, 695 rusak sedang dan 884 rusak ringan. Kecamatan Tanantovea sebanyak 630 rumah rusak berat, 274 rusak sedang dan 630 rusak ringan. Kecamatan Labuan ada 864 rumah rusak berat dan 496 rusak ringan. Kecamatan Sindue 1031 rumah rusak berat, 832 rumah rusak sedang dan 933 rusak ringan. Kecamatan Sindue Tombusabora 407 rumah rusak berat, 436 rusak sedang dan 935 rusak ringan. Kecamatan Sindue Tobata 389 rumah rusak berat, 102 rusak sedang dan 247 rusak ringan. Kecamatan Sirenja 1253 rusak sedang dan 1641 rusak ringan. Kecamatan Balaesang 1052 rumah rusak berat, 151 rusak sedang dan yang terakhir ada Kecamatan Balaesang Tanjung terdapat 866 rumah rusak berat, 590 rusak sedang dan 396 rusak ringan. (Tri Purwati, 2022)

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan disusul dengan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah yang terkena dampak bencana, kementerian ATR /BPN bersama kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah yang ikut bekerja bersama sesuai peran dan tugas pokok fungsinya. Rekonstruksi di wilayah Sulawesi Tengah sudah terlihat bahwa adanya berbagai aspek kendala dari beberapa macam hal. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemecahan masalah yang tepat agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Target waktu penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian paling lambat Desember 2019. Kemudian, untuk rumah masyarakat paling lambat agustus 2019.

Namun tujuan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi oleh pemerintah Kabupaten Donggala sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Masih ada beberapa Kecamatan termaksud kecamatan Labuan yang sampai saat ini masyarakatnya masih yang tinggal di huntara (hunian sementara).

Berdasarkan data yang disampaikan di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam mengatasi dampak yang terjadi akibat bencana alam gempa bumi tersebut dengan mengambil judul penelitian : “Impelemntasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi. (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah”).

LANDASAN TEORI

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis memfokuskan dengan dimensi yang mengacu pada teori Teori Evaluasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi, (2016) dimana indikator pengukuran Impelemntasi Kebijakan meliputi sumber daya,

karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antara organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2017) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti 5 menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (interview), observasi (observation), dan dokumentasi (taking notes). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Bedasarkan dimensi teori Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi, (2016). Dimana terdapat enam dimensi untuk mengukur Implemetasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi meliputi sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antara organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Hasil sementara. Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal. Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik. Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk

melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberikn oleh pemerintah.

PENUTUP

Impelemntasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki. Fakta yang ada di lapangan ternyata menyebutkan bahwa masih banyak ditemukan sejumlah ketidak berhasilan pemerintah Kabupaten Donggala dalam proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi diantaranya kurang perhatian yang kurang telitinya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi miss komunikasi sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyadi, (2016) Studi kebijakan publik dan Pelayanan publik , Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta
- Gita Fitria Ninsi Husen.L. 2017, *Koordinasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Sigi*. Universitas Tadulako. Jurnal

Perwati Try. 2022, *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Gempa Bumi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah*. Institusi
Pemerintahan Dalam Negri. Jurnal
Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

